



## **INTISARI**

Adanya kebijakan Dana Desa menyebabkan desa memperoleh kewenangan penatausahaan keuangan desa yang terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Besarnya Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah merupakan salah satu bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun Indonesia melalui desa. Dana desa dalam jumlah yang besar memberikan berbagai dampak bagi desa baik dalam hal positif maupun negatif. Dana desa dalam jumlah yang besar selain menghasilkan berbagai capaian output juga berimplikasi pada meningkatnya peluang penyalahgunaan dana desa. Serangkaian pemberitaan menyebutkan mengenai kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa serta memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal pengelolaan dana desa di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan didasarkan pada Internal Control Questionnaire (ICQ) kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan serta Tim Pengelola Kegiatan. Observasi dilaksanakan dengan mengamati aktivitas perangkat desa. Telaah dokumen dilaksanakan dengan mengamati dokumen yang relevan. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Desa Cikopo telah melaksanakan kelima komponen pengendalian yang terdapat dalam PP No. 60 Tahun 2008. Hasil ICQ menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Desa Cikopo dapat digolongkan ke dalam kategori cukup efektif dengan hasil persentase ICQ sebesar 72%.

Kata Kunci: pengendalian internal, pengendalian internal dana desa, keuangan desa



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA CIKOPO, KECAMATAN BUNGURSARI, KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT)

ALIFAH NURUL PUJI A, Rizky Wulandari, S.E., M.Acc., CfrA.

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## ABSTRACT

*The existence of a Village Fund policy causes villages to obtain village financial administration authority that is separate from district government finances. The size of the Village Fund budgeted by the government is clear proof of the government's seriousness in developing Indonesia through villages. Village funds in large numbers also have various impacts on the village, both positively and negatively. Village funds in large amounts, besides producing various output achievements, also have implications for increasing opportunities for misuse of village funds. A series of reports mentioned corruption cases that occurred at the village level. This study aims to evaluate the internal control system for managing village funds and provide input to improve the quality of internal control for managing village funds in Cikopo Village, Bungursari, Purwakarta, West Java.*

*This study uses qualitative methods with data collection techniques using interviews, observation, and document review. Interviews were conducted using the Internal Control Questionnaire (ICQ) with the Village Head, Village Secretary, Head of Financial Affairs, and the Activity Management Team. Observations were carried out by observing the activities of village officials. Document review is carried out by observing the relevant documents. Based on the analysis and discussion, it can be concluded that Cikopo Village has implemented the five control components contained in PP No. 60 of 2008. ICQ results show that the internal control system in managing village funds in Cikopo Village can be classified into the fairly effective category with an ICQ percentage result of 72%.*

*Keywords:* internal control, village funds internal control, village finance